

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Zainuddin, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- C.S.T.Kansil, 2003, *Sekitar Hak Asasi Manusia Dewasa Ini*, Karya Unipres, Jakarta.
- John Salindeho, 1987, *Masalah Tanah Dalam Pembangunan*, Cetakan. 3, Sinar Grafika, Jakarta.
- Jonathan Sarwono, 2006, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- M.P Siahian, 2003, *Bea perolehan atas tanah dan bangunan teori dan praktek*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Muhammad, Abdulkadir, 2004 *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Mukti Fajar, Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2021, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.
- R. Subekti, 2003, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT Intermasa, Jakarta.
- Wahyu, Mariatul Kiptiah, 2016, *Strategi Penanganan Konflik Perebutan Tanah*, Inteligensia Media, Malang.
- Yagus Suyadi, 2023, *Tindak Pidana Pelayanan Pertanahan dan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Kepentingan Umum*, Sinar Grafika. Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA).
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Tanah untuk Pembangunan Bagi Kepentingan Umum.

Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum.

Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1973 tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Tata Cara Pembebasan Tanah.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2011 tentang perubahan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah.

C. Jurnal

Helmi, 2011, "*Kedudukan Izin Lingkungan Dalam Sistem Perizinan di Indonesia*", Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 2, No. 1, 2011.

Luh Nyoman Diah Sri Prabandari, 2021, "*Pemberian Ganti Rugi Terhadap Pengadaan Tanah Oleh Pemerintah Untuk Kepentingan Umum*", Jurnal Jurnal Analogi Hukum, Vol. 3, No. 1, 2021.

Putri Lestari, 2020, "*Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Demi Kepentingan Umum Di Indonesia Berdasarkan Pancasila*", Jurnal SIGn Jurnal Hukum, Vol. 1, No. 2, 2020.

D. Internet

Abdul Rozak, “Pembangunan Nasional”, <https://dosenppkn.com/pembangunan-nasional/>, dikunjungi pada tanggal 24 Mei 2024, Jam 13.30.

Telkom Indonesia, “Sekilas Tentang Telkom Indonesia”,
https://www.telkom.co.id/sites/profil-telkom/id_ID, dikunjungi pada tanggal 15 September 2024, Jam 20.00.

Wikipedia, “Sungai Jambur, IX Koto Sungai Lasi, Solok”,
https://id.m.wikipedia.org/wiki/Sungai_Jambur,_IX_Koto_Sungai_Lasi,_Solok, dikunjungi pada tanggal 24 Mei 2025, Jam 14.00.

